

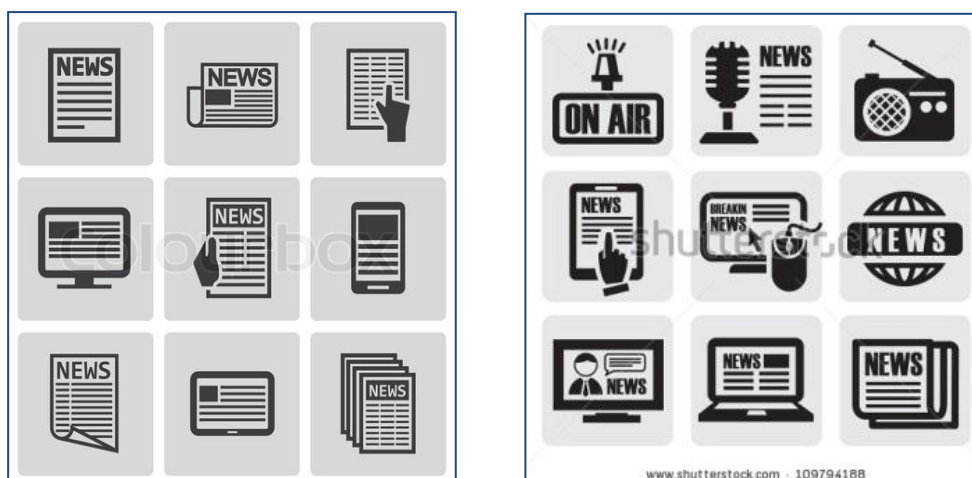


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

Politik

Selasa, 16 September 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2014**

## **Daftar Isi**

1. MENTERI EKONOMI PROFESIONAL (*Media Online Media Indonesia*)



**MEDIA  
INDONESIA** 4  
JUJUR BERSUARA

Harian Umum  
Media Indonesia  
@Midotcom  
Penerangan Iklan &  
Customer Service: 021 5021303  
No. Balai Pustaka: 06020160040  
www.mi.id | mediaindonesia.com

Selasa, 16 September 2014

Halaman 1, Kolom 1-5

# Menteri Ekonomi Profesional

Jokowi-JK menjanjikan kabinetnya kuat dan siap kerja. Menteri tidak boleh menjabat di parpol.

**SRI UTAMI**

**P**RESIDEN dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan M Jusuf Kalla memastikan kementerian bidang ekonomi akan diisi profesional murni. Artinya, mereka bukan dari kalangan partai politik.

"Di antaranya (menteri) keuangan, kemudian BUMN, kemudian Kementerian ESDM, pertanian," ungkap Jokowi dalam jumpa pers di Rumah Tim Transisi Jokowi-JK, Jl Situbondo no 10, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Jokowi-JK mengumumkan sekilas postur kabinet 2014-2019. Jokowi belum mau menjelaskan secara detail kabinetnya karena masih melakukan pendalaman.

Menurut dia, jumlah kementeriannya sebanyak 34, dengan pembagian 18 kementerian akan dijabat kalangan profesional dan 16 dari parpol. Kabinet masih diisi tiga menteri koordinator. "Kami sudah memutuskan jumlah kementerian ada 34. Ini yang paling penting, kami ingin bangun kabinet kuat, yang siap untuk kerja, siap untuk melaksanakan

program," kata Jokowi.

Saat ditanya apakah syarat menteri yang menjabat harus lepas jabatan di parpol, Jokowi menjawab singkat. "Sudah saya sampaikan bolak-balik. Itu tidak berubah."

Ia pun menambahkan, tujuan pengumuman struktur kabinet itu ialah ada ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan. "Masukan kan bisa dari mana saja, dari internet, dari surat juga bisa," imbuhnya.

Jokowi menyatakan akan menghapus jabatan wakil menteri, kecuali wakil menteri luar negeri.

Setelah penetapan struktur itu Jokowi-JK akan berkomunikasi dengan kalangan parpol dan profesional. "Bicara ke beberapa tokoh agar yakin 34 kementerian dengan strukturnya itu benar-benar diperlukan baik secara kelembagaan pemerintahan maupun pertimbangan politik," jelas

Deputi Ketua Tim Transisi Bidang Arsitektur Kabinet Andi Widjajanto.

**Ditunggu pasar**

Rencana Jokowi-JK memberikan kementerian bidang ekonomi ke profesional murni disambut ekonom Fauzi Ichsan.

## Arsitektur Kabinet Indonesia 2014-2019

• Total kementerian 34

### Kabinet Indonesia Bersatu II

• Profesional partai 20 orang • Profesional murni 14 orang

#### Jatah Partai

• Partai Demokrat 6 kementerian • Partai Golkar 3 kementerian  
• PKS 4 kementerian • PAN 3 kementerian  
• PPP 2 kementerian • PKB 2 kementerian

### Kabinet Jokowi-JK

• Profesional partai 16 orang • Profesional murni 18 orang

#### Perincian

• 19 kementerian tetap • 6 kementerian berubah nama  
• 6 kementerian gabungan • 3 kementerian baru

#### Kementerian profesional murni di antaranya

• Kementerian BUMN • Kementerian ESDM  
• Kementerian Pertanian • Kementerian Keuangan

#### Menko ada 3

Kementerian Luar Negeri masih membutuhkan wakil menteri



#### Usulan Lembaga Administrasi Negara (LAN)

• Opsi ideal 25 kementerian/Lembaga  
• Opsi moderat 29 kementerian/lembaga  
• Opsi realistis 31 kementerian/lembaga

Sumber: Tim Transisi 1/Grafis: CAKSONO

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: [interupsi@mediaindonesia.com](mailto:interupsi@mediaindonesia.com)  
Facebook: [Harian Umum Media Indonesia](https://www.facebook.com/HarianUmumMediaIndonesia)  
Twitter: @Midotcom  
Tanggapan Anda bisa diakses di [metrotvnews.com](http://metrotvnews.com)

"Inilah kabar yang ditunggu oleh pasar," ujarnya saat dihubungi, tadi malam.

Fauzi mengurai sejumlah pekerjaan rumah yang menanti menteri-menteri di sektor ekonomi, yakni persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak, penguraian defisit

neraca transaksi berjalan, arbitrase internasional, hingga revisi larangan ekspor mineral.

Jumlah 34 kementerian era Jokowi-JK sama dengan era SBY-Boediono, menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti, tidak masalah.

"Ada aksi yang harus segera diambil, seperti ruang fiskal sempit, subsidi BBM, energi langka, dan tugas lain. Kalau dipaksakan merombak (kabinet), akan buang-buang waktu," terang Destry.

Sekjen Partai NasDem Patricia Rio Capella mengatakan kabinet Jokowi jangan disamakan gemuk seperti kabinet SBY. "Jumlah 34 itu tidak mencerminkan gemuk, tapi memang ada penggabungan (beberapa kementerian) dan ada beberapa yang baru," tandasnya.

Apa pun yang diputuskan Jokowi, PKB akan mendukung sampai lima tahun ke depan. "PKB siap mengikuti semua keputusan Pak Jokowi dalam pembentukan kabinet," kata Sekjen PKB Imam Nahravi.

Pada era SBY, menteri koordinator perekonomian sempat dijabat Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN, dan Menteri ESDM Jero Wacik, dan Menteri Pertanian Suswono dari PKS. Jero Wacik kini menjadi tersangka kasus korupsi di kementeriannya. Kasusnya tengah disidik KPK. (Cah/Fat/Mus/X-6)

[ami@mediaindonesia.com](mailto:ami@mediaindonesia.com)  
Berita terkait him 4 & 17

**Presiden terpilih menjanjikan kabinetnya kuat dan siap kerja. Menteri tidak boleh menjabat di parpol dan memastikan kementerian bidang ekonomi akan diisi profesional murni**

Hashtag Berita :

#TransisiPemerintahan #StrukturalKabinet #RKP(RencanaKerjaPemerintah)